

Judul : Politikus Demokrat berang dituduh terlibat kasus BTS
Tanggal : Selasa, 11 Juli 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

Politikus Demokrat Berang Dituduh Terlibat Kasus BTS

Saut mendesak agar dilakukan pengkajian ulang terhadap berkas dakwaan. Jaksa dinilai hanya melindungi aktor besar pelaku korupsi kasus BTS tersebut.

THEOFILUS IFAN SUCIPTO
redaks@mediaindonesia.com

POLITIKUS Partai Demokrat Cipta Panca Laksana telah melaporkan pemilik akun [@ganiefirfan](#) ke Bareskrim Polri, Jakarta, kemarin. Panca berang karena dituding menerima aliran dana dari kasus korupsi *base transceiver station* (BTS) Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo).

"Betul saya telah melaporkan akun [@ganiefirfan](#) (Irvan Gani) ke Bareskrim Polri. *Tweet IG* (Irvan Gani) secara langsung telah menuduh saya terlibat langsung dalam kasus BTS Ke menkominfo dan menuduh menerima aliran dana," kata Cipta sesuai melapor ke Bareskrim.

Panca juga tidak terima atas tuduhan Irvan Gani dalam sebuah *podcast*.

Irvan menuding PT Indonesia Inisiatif Energi-tempat Panca menjabat sebagai direktur—mencuci uang korupsi BTS Rp350 miliar. Laporan itu tercantum dengan Nomor: LP/B/184/VII/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI.

Sementara itu, pegiat antikorupsi Saut Situ morang mempertanyakan adanya sejumlah nama politikus yang hilang dalam dokumen penuntutan dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti kemenkominfo.

"Kalau itu benar, kita patut memperdebatkannya dengan jaksa penuntut umum. Sebab, kalau itu benar, itu menimbulkan ketidakpastian penegakan hukum dan ketidakadilan," tegas Saut kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Saut mendesak agar dilakukan penekajian

ulang terhadap berkas dakwaan. Jaksa dinilai hanya melindungi aktor besar pelaku korupsi kasus BTS tersebut. "Sangat perlu (dikaji ulang) karena tidak boleh ada pilih-pilih dalam penegakan hukum," tandas Saut.

Tidak muncul

Dewan Penasihat Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat-UGM) Zainal Arifin Mochtar menyebut telah mengamati dakwaan para terdakwa yang sudah dibacakan di persidangan. Menurutnya, tak muncul nama-nama politikus yang diduga turut terlibat.

Termasuk pula nama-nama politikus yang diduga menerima aliran dana korupsi BTS. Akan tetapi, Zainal tak merinci nama nama politisi yang hilang dalam dokumen penuntutan padahal diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Zainal hanya menerangkan nama-nama politikus yang hilang dalam dakwaan yang dibacakan dalam persidangan itu membuktikan kasus korupsi BTS dengan kerugian negara sebesar Rp8,3 triliun itu merupakan perkara besar yang melibatkan orang-orang penting.

"Orang besar, keterkaitan besar dengan keterkaitan tertentu," pungkasnya.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana membantah informasi beredar terkait dengan adanya penghapusan beberapa nama pejabat dalam dokumen penuntutan korupsi BTS 4G Kemenkominfo.

"Saya tidak melihat ada nama yang hilang atau dihilangkan. Yang jadi patokan kami, pemeriksaan itu ialah berdasarkan dakwaan yang sudah dibacakan ke pengadilan," ungkap Ketut.

Sebelumnya, mantan Menkominfo Johnny G Plate yang merupakan kader Partai NasDem sempat menyebut bahwa pengadaan BTS 4G merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan kuasa hukum Plate, Achmad Cholidin, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (4/7).

"Faktanya program pembangunan BTS 4G 2021-2022 itu ialah penjabaran atau pelaksanaan arahan dari Presiden," ujar Cholidin. (Ykh/Ind/A-3)